

# RENCANA KERJA TAHUN 2018



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI BANTEN**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten tahun 2018 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Penyusunan Renja tahun 2018 ini dilaksanakan melalui tahapan perencanaan yang melibatkan unsur internal, Perangkat Daerah terkait, PDKPM dan seluruh stakeholder bidang penanaman modal di Provinsi Banten. Renja DPMPTSP Provinsi Banten tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal yang memuat rencana program/kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 dan Rencana Strategis DPMPTSP Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

Demikian Renja Tahun 2018 yang tersusun, dengan harapan dapat dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan bidang penanaman modal untuk periode satu tahun. Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga DPMPTSP Provinsi Banten mampu melaksanakan tugas dan pengabdian dengan sebaik-baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja.

Serang, 2017

 **Kepala DPMPTSP Provinsi Banten,**

 **Drs. Wahyu Wardhana, MA.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19591001 198803 1 003

## **DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1.    Latar Belakang .....	1
1.2.    Landasan Hukum.....	2
1.3.    Maksud dan Tujuan .....	4
1.4.    Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016 .....</b>	<b>6</b>
2.1.    Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian Renstra Tahun 2012-2017.....	6
2.2.    Analisis Kinerja DPMPTSP Provinsi Banten .....	14
2.3.    Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Provinsi Banten.....	16
2.4.    Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah.....	18
2.5.    Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	21
<b>BAB III TUJUAN , SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN .....</b>	<b>23</b>
3.1.    Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	23
3.2.    Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP Provinsi Banten .....	27
3.3.    Program dan Kegiatan .....	28
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>36</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1.	Capaian Kinerja Utama DPMPTSP Provinsi Banten Tahun 2016 .....	7
Tabel 2.2.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2016.....	8
Tabel 2.3.	Tahapan Penyusunan Rencana Kerja DPMPTSP Provinsi Banten.....	19
Tabel 2.4.	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2018 .....	22
Tabel 3.1.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DPMPTSP Provinsi Banten Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 .....	31

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. SPPN mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah disingkat dengan RPJP daerah untuk jangka waktu dua puluh tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP nasional; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah yang selanjutnya disebut RPJM daerah untuk jangka waktu lima tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah dengan memperhatikan RPJM nasional; (3) Rencana Kerja Pembangunan

Daerah, selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu satu tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada rencana kerja Pemerintah. Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 pada Pasal 2 menjelaskan bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD.

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten Tahun 2018 merupakan sebuah pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah digariskan dalam RKPD. Mengingat arti strategis Renja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan harus mengikuti tata cara dan alur penyusunan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, antara lain:

- a. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
- b. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
- c. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
- d. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan rencana kerja DPMPTSP Provinsi Banten Tahun 2018 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
- b. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
- f. Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737 );
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- l. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten;

- m. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten tahun 2012-2017;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Dokumen Renja DPMPTSP Provinsi Banten Tahun 2018 dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan urusan pembangunan penanaman modal untuk periode satu tahun pada tahun 2018 yang ditujukan :

- a. Sebagai acuan bagi Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan dalam bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan.
- b. Sebagai acuan bagi DPMPTSP Provinsi Banten dalam pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui program dan kegiatan tahun 2018.
- c. Sebagai acuan bagi DPMPTSP Provinsi Banten dalam melakukan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan urusan penanaman modal tahun 2018.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

#### **Bab I Pendahuluan**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### **Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

Bab ini menjelaskan evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian Renstra OPD Tahun 2012-2017. Selain itu, pada bab ini juga berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan, penjelasan mengenai proses yang dilakukan, dan penjelasan temuan-temuan proses dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

### **Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

### **Bab IV Penutup**

Berisi tentang simpulan akhir dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan pada bab-bab sebelumnya.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian Renstra Tahun 2012-2017**

Berdasarkan Renstra DPMPTSP Provinsi Banten Tahun 2012-2017, DPMPTSP Provinsi Banten memiliki visi “Satu Gerbang, Sejuta Peluang”. Sedangkan misi yang akan dicapai adalah:

- a. Mewujudkan Kapasitas Kelembagaan yang berkualitas;
- b. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing;
- c. Meningkatkan daya tarik Penanaman Modal.
- d. Meningkatkan pelayanan realisasi pelaksanaan penanaman modal secara terpadu

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, B DPMPTSP Provinsi Banten pada tahun 2016 melaksanakan 5 program, dan 13 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
  - a. Kegiatan Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
  - b. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
2. Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran, dan Kapasitas Aparatur
  - a. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana
  - b. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
  - c. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
  - d. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur
  - e. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah
3. Program Peningkatan Iklim Investasi
  - a. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
  - b. Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan Satu Pintu
  - c. Kegiatan Fasilitasi Percepatan Realisasi Izin Usaha Tetap Penanaman Modal

4. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
  - a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal
  - b. Kegiatan Kerjasama Investasi
5. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah
  - a. Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

Pengukuran kinerja DPMPTSP Provinsi Banten didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Capaian Kinerja Utama DPMPTSP Provinsi Banten Tahun 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka mempertahankan keberadaan investasi yang ada serta menarik investasi baru	Cakupan layanan regulasi perijinan Bidang Penanaman Modal	25%	25%	100%
2	Meningkatnya promosi dan kerjasama dalam menarik realisasi investasi	Nilai realisasi Investasi PMA (Rp)	9,58 Triliun	39,89 Triliun	404,97%
		Nilai realisasi Investasi PMDN (Rp)	4,25 Triliun	12,43 Triliun	292,24%

Secara umum, hampir semua rencana anggaran dan kegiatan tahunan dapat dilaksanakan dengan baik jika dilihat dari sisi keluaran (output). Sedangkan dari sisi manfaat (outcome), beberapa kegiatan perlu diperbaiki kualitasnya atau diganti dengan kegiatan-kegiatan lain agar bermanfaat dalam mencapai visi DPMPTSP Provinsi Banten di masa mendatang. Lebih jelas tentang evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian Rencana Strategis DPMPTSP Provinsi Banten sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2016

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES) PROGRAM/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s.d. TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENTRA SKPD s.d. TAHUN BERJALAN 2017	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s.d. TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
1 16	Bidang Penanaman Modal									
1 16 01	Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah									
	Rasio Ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan	100%	60%	100%	100%	100%	100%	100%	10%	85%
	Rasio ketersediaan dokumen penatausahaan, pengendalian dan evaluasi laporan keuangan	100%	60%	100%	100%	100%	100%	100%	10%	85%
1 16 01 01	Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset									
	Dokumen Laporan Neraca Saldo BKPMPT Semesteran	10 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	8 Dokumen	80%	
	Tersusunnya Laporan Realisasi Anggaran BKPMPT Semesteran	6 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	90%	
	Dokumen Laporan Pengesahan Pertanggung jawaban Bendahara BKPMPT Semester I dan II	6 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	90%	
	Dokumen Data TLHP Reguler I dan II	10 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	8 Dokumen	80%	
	CALK BKPMPT dan Dokumen Laporan Prognosis	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%	
	Dokumen Data SP2D	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%	
	Software Aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Keuangan yang terupgrade	5 Aplikasi	3 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%	1 Aplikasi	5 Aplikasi	100%	
	Kegiatan Koordinasi dan konsultasi aset BKPMPT Provinsi Banten	5 Kegiatan	3 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	4 Kegiatan	80%	
	Laporan fungsional bendaharawan	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%	
1 16 01 02	Kegiatan Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan									
	Dokumen Renstra BKPMPT	1 Dokumen	-	-	-	100%	1 Dokumen	-	0%	

				Prov.Banten Tahun 2017-2021								
				Renja BKPMPT Provinsi Banten Tahun 2013-2017	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
				Dokumen Laporan Triwulan Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan BKPMPT Provinsi Banten	20 Dokumen	12 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	17 Dokumen	85%
				Dokumen Laporan Pelaksanaan program/kegiatan BKPMPT Provinsi Banten	60 Dokumen	36 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	51 Dokumen	85%
				Dokumen Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan BKPMPT Provinsi Banten	10 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	8 Dokumen	80%
				Dokumen hasil pemantauan lapangan Pelaksanaan rencana pelaksanaan Pembangunan BKPMPT Provinsi Banten	10 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	8 Dokumen	80%
				LKPJ dan LAKIP BKPMPT Banten	10 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	10 Dokumen	100%
				Dokumen SPM ,SOP dan SP BKPMPT Provinsi Banten	15 Dokumen	9 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	12 Dokumen	80%
				TAPKIN BKPMPT Provinsi Banten	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	100%
				Aparatur BKPMPT yang dikirim sebagai Peserta Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal dan KP3MN	50 Orang	30 Orang	10 Orang	10 Orang	100%	10 Orang	50 Orang	100%
				Aparatur BKPMPT yang dikirim sebagai Peserta Mukornis di 3 Provinsi	50 Orang	30 Orang	10 Orang	10 Orang	100%	10 Orang	40 Orang	80%
1	16	02		Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur								
				Rasio penyediaan barang dan jasa Administrasi perkantoran serta pelayanan tata usaha kerumah tanggaan	100%	60%	100%	100%	100%	100%	10%	85%
				Rasio penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah	100%	60%	100%	100%	100%	100%	10%	85%
				Rasio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana aparatur	100%	60%	100%	100%	100%	100%	0%	80%
				Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian	100%	60%	100%	100%	100%	100%	10%	85%
1	16	02	01	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor								
				Jumlah Jaringan IT yang beroperasi	5 Unit	3 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	5 Unit	100%
				Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 yang telah dibeli	10 Unit	6 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	8 Unit	80%

				Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2 yang telah dibeli	10 Unit	6 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	8 Unit	80%
				Jumlah Alat Studio yang telah dibeli	5 Unit	3 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	4 Unit	80%
				Jumlah Komputer yang telah dibeli	20 Unit	12 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	4 Unit	16 Unit	80%
				Jumlah Peralatan Kantor yang telah dibeli	5 Unit	3 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	4 Unit	80%
				Jumlah Mebeulair Kantor yang telah dibeli	5 Unit	3 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	4 Unit	80%
1	16	02	02	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor			3 Unit	1 Unit		1 Unit		0%
				Jumlah Gedung kantor yang terpelihara	5 Unit	3 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	4 Unit	80%
				Jumlah kendaraan dinas Roda 4 yang terpelihara	65 Unit	39 Unit	13 Unit	13 Unit	100%	13 Unit	52 Unit	80%
				Jumlah kendaraan dinas Roda 2 yang terpelihara	70 Unit	42 Unit	14 Unit	14 Unit	100%	14 Unit	56 Unit	80%
				Jumlah Peralatan kantor yang terpelihara	5 Paket	3 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	4 Paket	80%
1	16	02	03	Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran								
				Pakaian Dinas (PDH) yang tersedia	250 Stel	150 Stel	50 Stel	50 Stel	100%	50 Stel	200 Stel	80%
				Pakaian Keamanan Dalam(Satpam) yang tersedia	30 Stel	18 Stel	6 Stel	6 Stel	100%	6 Stel	24 Stel	80%
				Pakaian Batik yang tersedia	250 Stel	150 Stel	50 Stel	50 Stel	100%	50 Stel	200 Stel	80%
				Barang Pakaian Habis (ATK Materai dll) yang tersedia	5 Paket	3 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
				Pengadaan Barang Cetakan	5 Paket	3 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	5 Paket	100%
				Barang Alat-alat Listrik yang tersedia	5 Paket	3 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	5 Paket	100%
				Alat-alat Kebersihan yang tersedia	5 Paket	3 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	5 Paket	100%
				Bahan Bakar Minyak Kendaraan Bermotor Roda Empat yang tersedia	5 Paket	3 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	5 Paket	100%
				Bahan Bakar Minyak Kendaraan Bermotor Roda Dua yang tersedia	85.800 Liter	51.480 Liter	17.160 Liter	17.160 Liter	100%	17.160 Liter	68.640 Liter	80%
				Pengadaan Makan dan Minum Rapat	5 Paket	3 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	5 Paket	100%
				Jaringan (Telepon, Listrik dan Internet) yang dibayar	60 Bulan	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	51 Bulan	85%
1	16	02	04	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur								
				Aparatur BKPMPT Provinsi Banten yang dikirim pada Kegiatan Diklat, Sosialisasi, Seminar, Bintek, Workshop dll.	100 Orang	60 Orang	20 Orang	20 Orang	100%	20 Orang	82 Orang	82%
				PPID Penanaman modal daerah Provinsi Banten yang beroperasi	5 Unit	3 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	5 Unit	100%

1	16	02	05	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah								
				Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah	60 Bulan	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	51 Bulan	85%
1	16	52		Program Peningkatan Iklim Investasi								
				Cakupan regulasi perijinan bidang penanaman modal	100%	60%	25%	25%	100%	100%	-	85%
1	16	52	01	Kegiatan Pengendalian dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal								
				Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal dan Bimtek LKPM	25 Kegiatan	15 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100%	5 Kegiatan	20	80%
				Perusahaan Berprestasi yang mendapat Penghargaan	50 Perusahaan	30 Perusahaan	10 Perusahaan	10 Perusahaan	100%	10 Perusahaan	40	80%
				Dokumen hasil Pemantauan kegiatan Penanaman Modal PMA dan PMDN se-Provinsi Banten	5 Dokumen, 400 Perusahaan	3 Dokumen, 210 Perusahaan	1 Dokumen, 90 Perusahaan	1 Dokumen, 90 Perusahaan	100%	1 Dokumen, 100 Perusahaan	4 Dokumen, 300 Perusahaan	80%
				Permasalahan yang terselesaikan Kegiatan Penanaman Modal (Task Force)	35 Permasalahan	18 Permasalahan	8 Permasalahan	8 Permasalahan	100%	9 Permasalahan	26 Permasalahan	80%
				Dokumen Data LKPM PMA/PMDN	20 Dokumen	12 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	16 Dokumen	80%
				Dokumen Data Perusahaan PMA dan PMDN se-Provinsi Banten	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%
1	16	52	02	Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu								
				Peraturan Gubernur Provinsi Banten tentang Teknis Pelaksanaan PTSP Pelayanan dan Pengaduan Penanaman Modal	5 Eksemplar	3 Eksemplar	1 Eksemplar	1 Eksemplar	100%	1 Eksemplar	4 Eksemplar	80%
				Jumlah Perusahaan Penanaman Modal PMDN perijinan dan non perijinan yang terlayani	600 Perusahaan	330 Perusahaan	130 Perusahaan	130 Perusahaan	100%	140 Perusahaan	460 Perusahaan	80%
				PTSP Kab./Kota yang telah terbina Penyelenggaraan Operasional Pelayanan	8 PTSP Kabupaten/Kota	8 PTSP Kabupaten/Kota	8 PTSP Kabupaten/Kota	8 PTSP Kabupaten/Kota	100%	8 PTSP Kabupaten/Kota	8 PTSP Kabupaten/Kota	80%
				PTSP Provinsi Banten yang Terfasilitasi Sarana dan Prasannya	5 PTSP	3 PTSP	1 PTSP	1 PTSP	100%	1 PTSP	4 PTSP	80%
				Dokumen Data Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%
				Aparatur PTSP yang terlatih Peningkatan Kualitas SDM	100 Orang	60 Orang	20 Orang	20 Orang	100%	20 Orang	80 Dokumen	80%
				Kegiatan Koordinasi Pelayanan PTSP Kab./Kota	10 Kegiatan	6 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	2 Kegiatan	8 Kegiatan	80%

1	16	52	03	Kegiatan Fasilitasi Percepatan Realisasi Izin Usaha Tetap Penanaman Modal								
				Dokumen Pedoman Ketentuan Kebijakan Pelaksanaan Percepatan Realisasi IUT Penanaman Modal	5 Dokumen	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%
				Dokumen Hasil Pemantauan Percepatan Realisasi IUT Penanaman Modal	5 Dokumen	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%
				Perusahaan PMA/PMDN yang Terfasilitasi Percepatan Realisasi IUT Penanaman Modal	600 Perusahaan	330 Perusahaan	130 Perusahaan	130 Perusahaan	100%	140 Perusahaan	460 Perusahaan	80%
1	16	53		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi								
				Nilai realisasi Investasi PMA	Rp 47,01 Triliun	Rp 105,7 Triliun	Rp 9,85 Triliun	Rp 39,89 Triliun	404,97%	Rp 10,34 Triliun	Rp 169 Triliun	361,60%
				Nilai realisasi Investasi PMDN	Rp 20,31 Triliun	Rp 22,8 Triliun	Rp 4,25 Triliun	Rp 12,4 Triliun	292,24%	Rp 4,47 Triliun	Rp 40,3 Triliun	198,52%
1	16	53	01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal								
				Kegiatan Promosi Investasi di Dalam Negeri	30 Kegiatan	18 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100%	6 Kegiatan	24 Kegiatan	80%
				Kegiatan Promosi di Luar Negeri	15 Kegiatan	9 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%	3 Kegiatan	12 Kegiatan	80%
				Jumlah Sarana dan Prasarana Promosi Investasi	25 Kegiatan	15 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100%	5 Kegiatan	20 Kegiatan	80%
				Jumlah Promosi di New Media (Website, Provider, Internet), Media Massa & Media Elektronik	15 Media	9 Media	3 Media	3 Media	100%	3 Media	12 Media	80%
				Jumlah Calon Investor yang berminat berinvestasi yang terfasilitasi	310 Calon Investor	210 Calon Investor	70 Calon Investor	70 Calon Investor	100%	80 Calon Investor	230 Calon Investor	80%
1	16	53	02	Kegiatan Kerjasama Investasi								80%
				Kegiatan Kerjasama antar Pemerintah (G to G)	21 Kegiatan	10 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100%	6 Kegiatan	15 Kegiatan	80%
				Kegiatan Kerjasama antara Pemerintah dengan Swasta(G to B)	21 Kegiatan	10 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100%	6 Kegiatan	15 Kegiatan	80%
				Kegiatan kerjasama dan kemitraan antara swasta dan swasta (B to B) yang terfasilitasi	21 Kegiatan	10 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100%	6 Kegiatan	15 Kegiatan	80%
1	16	72		Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah								
				Rasio ketersediaan data dan informasi pembangunan penanaman modal daerah	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
1	16	72	01	Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan								
				Dokumen F profil Penanaman modal	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	100%

			daerah Provinsi Banten						
			Data base Penanaman modal daerah Provinsi Banten	5 Unit	3 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Dokumen
			Dokumen Data Potensi dan Peluang Investasi Provinsi Banten	10 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen
			Dokumen Realisasi Investasi Provinsi Banten	20 Dokumen	12 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen
			Jumlah Publikasi Informasi Penanaman Modal	15 Media	9 Media	3 Media	3 Media	100%	3 Media
			Dokumen Data Potensi dan Peluang Investasi Provinsi Banten	10 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Tuntutan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas saat ini telah menjadi komitmen bersama, hal ini tidak berlebihan karena sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Dalam upaya meningkatkan kualitas dan jaminan penyediaan pelayanan publik ini lahirlah terobosan-terobosan berbentuk peraturan perundangan. Sebagai contoh disahkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Demikian halnya terobosan dalam upaya peningkatan pelayanan publik terkait investasi. Pemerintah pusat telah mengeluarkan beberapa peraturan terkait pelayanan perizinan usaha seperti Inpres No. 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal. Bahkan pada tahun 2010 ditandatangani Surat Edaran Bersama 3 (tiga) menteti yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal. Berbagai terobosan menjadi ukuran kinerja pemerintah. Masyarakat saat ini kian memahami hak-haknya dan berani bersuara untuk menuntut jika mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Kondisi ini mendorong perlunya panduan praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pelayanannya.

Masih terkait dengan pelayanan publik di bidang penanaman modal, Pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Banten melakukan mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubenur Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal dan pada tahun 2016 lahirlah Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur

## Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal.

Oleh karena peningkatan kinerja pelayanan adalah tugas yang harus dilaksanakan terus menerus maka DPMPTSP Provinsi Banten, berkomitmen untuk melaksanakan pelayanan bermutu tinggi kepada investor dan masyarakat berdasarkan *Standard Operasional Procedures* (SOP) secara berkelanjutan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan publik. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun setelah tahap kegiatan selesai dan berfungsi. Selain itu indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka dan atau menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas maka DPMPTSP Provinsi Banten akan membuat laporan kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran berupa keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing- masing kegiatan. Ada beberapa indikator kinerja yang sering dipergunakan dalam pengukuran kinerja organisasi yaitu:

1. Indikator Masukan (*input*) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumberdaya manusia, informasi, kebijaksanaan/peraturan perundang-undangan dan sebagainya.
2. Indikator Keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik.
3. Indikator Hasil (*outcome*) adalah sesuatu yang menggambarkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.

4. Indikator Manfaat (*benefit*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

Implementasi program kegiatan pelayanan DPMPTSP Provinsi Banten secara umum ditujukan pada beberapa kelompok sasaran sebagai berikut:

1. Aparatur Penanaman Modal serta Instansi terkait di kabupaten/kota
2. Para pengusaha/investor dalam negeri maupun asing.
3. Masyarakat pada umumnya.

Adapun bentuk pelayanan yang diberikan adalah koordinasi dan fasilitasi seperti pendampingan, pembinaan, pengawasan serta *mapping* potensi investasi. Sementara untuk pelayanan perizinan melalui PTSP menerbitkan izin berupa perizinan dan non perizinan.

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Dalam menyelesaikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya dengan melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Provinsi Banten yang harus ditangani dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga masih belum didukung sepenuhnya dengan kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur serta ketersedian sarana prasarana kerja yang memadai.
2. Efektifitas kegiatan promosi (marketing investasi) masih belum didukung sepenuhnya dengan sarana dan prasarana serta media informasi, penentuan segmen pasar dan informasi investasi.
3. Pemanfaatan potensi investasi unggulan daerah masih belum tergali secara optimal.
4. Masih lemahnya implementasi pelaksanaan kerjasama penanaman modal antar pemerintahan dan antara pemerintahan dengan swasta.

5. Pelayanan perizinan penanaman modal di daerah masih belum dilakukan secara optimal, karena masih belum didukung sepenuhnya oleh kerangka regulasi, prasarana dan sarana pelayanan yang memadai.
6. Masih belum tertanggulanginya permasalahan penanaman modal secara tepat dan terarah, serta masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat/stakeholders terhadap kerangka regulasi investasi.
7. Kondisi sarana dan prasarana wilayah daerah yang masih belum mendukung sepenuhnya terhadap daya tarik para penanam modal daerah.
8. Koordinasi pelaksanaan penanaman modal daerah dengan kabupaten/kota yang masih belum optimal dalam hal dalam kebijakan penanaman modal daerah, kerjasama penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pengelolaan dan sistem informasi penanaman modal.
9. Data dan informasi kondisi penanaman modal daerah setiap tahunnya masih memerlukan pemutahiran yang tepat dan terarah.

Berdasarkan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Provinsi Banten yang dianalisis secara lingkungan internal dan lingkungan eksternal, diantaranya adalah:

1. Pemantapan sumber daya, manajemen dan kinerja DPMPTSP Provinsi Banten yang terarah serta berkualitas dalam mendukung pelaksanaan penanaman modal daerah.
2. Optimalisasi penggalian dan pemanfaatan potensi investasi unggulan daerah seperti potensi investasi sektor primer dan pusat pertumbuhan industri berbasis industri unggulan Banten sesuai konsep, daya dukung infrastruktur dan penyediaan lahan investasi, pengembangan usaha dan kerjasama daerah.
3. Efektivitas kegiatan promosi investasi dengan bentuk dan media penyelenggaraan promosi, segmentasi pasar dan *marketing intellegence*, pusat informasi investasi, dan Banten Invesment Partner.

4. Optimalisasi pelayanan perijinan terpadu melalui kerangka regulasi teknis dan kesiapan prasarana dan sarana daerah dalam pelaksanaan PTSP;
5. Penanggulangan permasalahan penanaman modal dan pemahaman peraturan pelaksanaan kegiatan penanaman modal dikalangan investor maupun masyarakat.
6. Optimalisasi koordinasi dengan kabupaten/kota dalam kebijakan penanaman modal daerah, kerjasama penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pengelolaan dan sistem informasi penanaman modal.
7. Pemutakhiran data dan informasi kondisi penanaman modal daerah setiap tahun yang tepat dan terarah.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Untuk mereview terhadap rancangan Awal RKPD perlu terlebih dahulu diuraikan tahapan dalam penyusunan Renja. Secara umum penyusunan Renja DPMPTSP Provinsi Banten diselenggarakan melalui serangkaian tahapan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Bidang Penanaman Modal Se-Provinsi Banten;
2. Penyusunan Rancangan Akhir Renja DPMPTSP Provinsi Banten;
3. Penetapan Peraturan Kepala DPMPTSP Provinsi Banten tentang Renja DPMPTSP Provinsi Banten.

Sedangkan secara rinci, tahapan penyusunan Renja beserta uraian kegiatannya disajikan dalam Gambar berikut:

Tabel 2.3. Tahapan Penyusunan Rencana Kerja DPMPTSP Provinsi Banten

No	Tahapan	Uraian / Kegiatan	Input	Output
1	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Bidang Penanaman Modal Provinsi Banten	Persiapan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Bidang Penanaman Modal Provinsi Banten	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rancangan Renja DPMPTSP Provinsi Banten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Panduan Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah Bidang Penanaman Modal (Lokasi, Waktu, Susunan Acara, Tata Tertib dan Peserta)</li> <li>Materi Forum Perangkat Daerah Bidang Penanaman Modal Provinsi Banten</li> </ul>
		Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Bidang Penanaman Modal Provinsi Banten	<ul style="list-style-type: none"> <li>Panduan Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah Bidang Penanaman Modal (Lokasi, Waktu, Susunan Acara, Tata Tertib dan Peserta)</li> <li>Materi Forum Perangkat Daerah Bidang Penanaman Modal Provinsi Banten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rancangan Renja DPMPTSP Provinsi Banten yang Telah disempurnakan Berdasarkan Hasil Forum Perangkat Daerah Bidang Penanaman Modal Provinsi Banten</li> </ul>
		Penyampaian Hasil Forum Perangkat Daerah Bidang Penanaman Modal Provinsi Banten Kepada BAPPEDA Provinsi Banten	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rancangan Renja DPMPTSP Provinsi Banten yang Telah Disempurnakan Berdasarkan Hasil Forum Perangkat Daerah Bidang Penanaman Modal Provinsi Banten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rancangan RKPD Provinsi Banten</li> </ul>
2	Penyusunan Renja DPMPTSP Provinsi Banten	Pembentukan Tim Penyusunan Renja DPMPTSP Provinsi Banten	<ul style="list-style-type: none"> <li>SE Gubernur Perihal Penyusunan RKPD dan Renja OPD serta Penyelenggaraan Musrenbang dan Forum Perangkat Daerah Bidang Penanaman Modal Provinsi Banten</li> <li>Data dan Informasi Kepegawaian DPMPTSP Provinsi Banten</li> <li>Data dan Informasi Tim Ahli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surat DPMPTSP Provinsi Banten Perihal Tim Penyusunan Renja DPMPTSP Provinsi Banten</li> </ul>
		Perumusan Rencana Kerja dan Substansi Penyusunan Renja DPMPTSP Provinsi Banten	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Banten Perihal Tim Penyusunan Renja DPMPTSP Provinsi Banten</li> <li>Renstra DPMPTSP Provinsi Banten</li> <li>Rancangan Awal RKPD Provinsi Banten</li> <li>Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra OPD, RKPD, Renja OPD dan Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi Banten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rencana Penyusunan Renja DPMPTSP Provinsi Banten</li> <li>Rancangan Daftar Isi Renja DPMPTSP Provinsi Banten</li> <li>Check List Kebutuhan Data dan Informasi</li> </ul>

No	Tahapan	Uraian / Kegiatan	Input	Output
		Inventarisasi Data dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rencana Penyusunan Renja DPMPTSP Provinsi Banten</li> <li>Rancangan Daftar Isi Renja DPMPTSP Provinsi Banten</li> <li>Check List Kebutuhan Data dan Informasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data dan Informasi Kelembagaan dan Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Tupoksi DPMPTSP Provinsi Banten</li> <li>Hasil Analisis dan estimasi Kondisi Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Tupoksi DPMPTSP Provinsi Banten</li> </ul>
		Penyusunan Rancangan Renja DPMPTSP Provinsi Banten	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data dan Informasi Kelembagaan dan Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Tupoksi DPMPTSP Provinsi Banten</li> <li>Hasil Analisis dan Estimasi Kondisi Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Tupoksi DPMPTSP Provinsi Banten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rancangan Renja DPMPTSP Provinsi Banten</li> </ul>
		Penyusunan Rancangan Akhir Renja DPMPTSP Provinsi Banten	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rancangan RKPD Provinsi Banten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rancangan Akhir Renja DPMPTSP Provinsi Banten</li> </ul>
		Sinkronisasi Rancangan Akhir RKPD Provinsi Banten dengan Rancangan Akhir Renja DPMPTSP Provinsi Banten	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rancangan Akhir RKPD Provinsi Banten</li> <li>Rancangan Akhir Renja-DPMPTSP Provinsi Banten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rancangan Akhir Renja DPMPTSP Provinsi Banten yang Telah di Mutakhirkan</li> </ul>
3	Penetapan Peraturan Kepala DPMPTSP Provinsi Banten Tentang Renja DPMPTSP Provinsi Banten	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala DPMPTSP Provinsi Banten Tentang Renja OPD Provinsi Banten	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rancangan Akhir Renja-DPMPTSP Provinsi Banten yang Telah di utakhirkan</li> </ul>	Rancangan Peraturan Kepala DPMPTSP Provinsi Banten Tentang Renja DPMPTSP Provinsi Banten Beserta Lampirannya
		Penetapan Rancangan Peraturan Kepala DPMPTSP Provinsi Banten Tentang Renja- DPMPTSP Provinsi Banten	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rancangan Peraturan Kepala DPMPTSP Provinsi Banten Tentang Renja DPMPTSP Provinsi Banten Beserta Lampirannya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Kepala DPMPTSP Provinsi Banten Tentang Renja DPMPTSP Provinsi Banten Beserta Lampirannya</li> </ul>

## **Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Kabupaten/kota, serta untuk mendapatkan usulan dan masukan program dan kegiatan dari Kabupaten/kota, maka pada awal tahun 2015, DPMPTSP Provinsi Banten telah menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah dengan instansi penanaman modal di Kabupaten/kota serta OPD teknis terkait perizinan. Beberapa usulan dari Kabupaten/kota pada pelaksanaan Forum Daerah Bidang Penanaman Modal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk meningkatkan akses informasi dan kelembagaan sumber daya investasi, maka perlu dilakukan penajaman kegiatan untuk tercapainya kinerja Program/Kegiatan.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal ini Bidang Penanaman Modal mengakui adanya ketidak akuratan data penanaman modal di Kabupaten/Kota, sehingga diusulkan adanya bank data mengenai penanaman modal maupun profil investasi Provinsi Banten yang lebih akurat yang difasilitasi oleh DPMPTSP Provinsi Banten.
3. Pada Forum Perangkat Daerah Bidang Penanaman Modal disampaikan pula permasalahan-permasalahan yang dihadapi investor di Kabupaten//Kota. Pemerintah Kabupaten/Kota mengharapkan Pemerintah Provinsi untuk dapat menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang ada. Untuk itu, DPMPTSP Provinsi Banten akan memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terjadi di Kabupaten/Kota melalui kegiatan pengendalian penanaman modal;
4. Kabupaten/Kota mengharapkan agar DPMPTSP Provinsi Banten dapat mengakomodir Kabupaten/Kota untuk mengikuti Diklat PTSP.

Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2018

NO	PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Perizinan	Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak			
2	Pengiriman Diklat Pegawai Bidang Perizinan	8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten			

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Penguatan investasi ditempuh melalui dua pilar kebijakan yaitu pertama adalah Peningkatan Iklim Investasi dan dan Iklim Usaha untuk meningkatkan efisiensi proses perizinan bisnis; dan kedua adalah Peningkatan Investasi yang inklusif terutama dari investor domestik. Kedua pilar kebijakan ini akan dilakukan secara terintegrasi baik di tingkat pusat maupun di daerah. Arah kebijakan yang ditempuh dalam pilar pertama penguatan investasi adalah menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang dapat meningkatkan efisiensi proses perizinan, meningkatkan kepastian berinvestasi dan berusaha di Indonesia, serta mendorong persaingan usaha yang lebih sehat dan berkeadilan. Adapun strategi yang ditempuh adalah:

1. Peningkatan kepastian hukum terkait investasi dan usaha, yang terutama dilakukan melalui:
  - a. Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan pusat dan daerah agar kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah dapat selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Salah satu upayanya adalah dengan penyusunan Peta Jalan Harmonisasi Regulasi terkait Investasi.
  - b. Penghapusan regulasi dan peraturan di pusat dan daerah yang menghambat dan mempersulit dunia usaha untuk berinvestasi dan berusaha,
  - c. Penghapusan rente ekonomi yang menyebabkan tingginya biaya perizinan, baik di pusat maupun di daerah,
  - d. Penyediaan tata ruang wilayah kabupaten/kota yang telah dijabarkan ke dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kepastian perizinan lokasi usaha dan investasi.
2. Penyederhanaan prosedur perizinan investasi dan usaha di pusat dan daerah, terutama untuk sektor pengolahan dan jasa, antara lain: sektor migas, jasa transportasi laut, serta sektor industri manufaktur berbasis sumber daya alam.

3. Pengembangan layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha, melalui:
  - a. Optimalisasi penyelenggaraan PTSP di daerah, antara lain dengan pendeklegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga/instansi yg memiliki kewenangan.
  - b. Pendirian Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nasional (PTSPN), untuk menyatukan perizinan tingkat pusat pada satu tempat layanan perizinan. Adapun langkah yang akan dilakukan, antara lain adalah:
  - c. Pengembangan kelembagaan PTSPN
  - d. Penyederhanaan dan standarisasi prosedur, pengembangan proses perizinan secara paralel untuk menghemat waktu, serta pengembangan layanan pengaduan permasalahan perizinan
  - e. Penciptaan transparansi dan akuntabilitas proses perizinan, sehingga dapat meningkatkan kepastian waktu dan kredibilitas layanan.
  - f. Pengembangan tracking system perizinan di PTSPN
4. Pemberian insentif dan fasilitasi investasi (berupa: insentif fiskal dan non fiskal) yang lebih selektif dan proses yang transparan, yang dapat:
  - a. Mendorong pengembangan investasi sektor manufaktur dengan mengedepankan keseimbangan sebaran investasi antara Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa
  - b. Mendorong pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur energi nasional
  - c. Mendorong pengembangan industri yang dapat menghasilkan bahan baku atau barang modal sederhana
  - d. Mendorong investor terutama investor dalam negeri untuk mengembangkan industri pengolahan bahan tambang dalam negeri
  - e. Mendorong investasi sektor minyak dan gas yang mempertimbangkan aspek kesulitan geologi dan meningkatkan produktivitas sumur-sumur tua, daerah baru, dan laut dalam.

5. Pendirian Forum Investasi, yang beranggotakan lintas kementerian dan lintas pemangku kepentingan yang secara rutin mengadakan pertemuan untuk memonitor, mengatasi permasalahan investasi, dan mencari solusi terbaik agar dapat terus menjaga iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha dan investor.
6. Peningkatan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif.
7. Peningkatan persaingan usaha yang sehat melalui pencegahan dan penegakan hukum persaingan usaha dalam rangka penciptaan kelembagaan ekonomi yang mendukung iklim persaingan usaha yang sehat, penyehatan struktur pasar serta penguatan sistem logistik nasional yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi yang berkeadilan, melalui:
  - a. Reposisi dan penguatan kelembagaan KPPU,
  - b. Pencegahan dan penegakan hukum terhadap praktik anti persaingan usaha yang sehat (seperti: monopoli dan kartel) yang mendistorsi pasar
  - c. Pengawasan yang dititikberatkan pada komoditas pangan, energi, keuangan, kesehatan dan pendidikan, serta infrastruktur dan logistik,
  - d. Peningkatan harmonisasi kebijakan pemerintah agar sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat,
  - e. Pengawasan kemitraan antara usaha besar, menengah, kecil dan mikro.

Usaha pemerintah untuk meningkatkan perekonomian Indonesia secara nasional juga didukung melalui 14 paket kebijakan ekonomi yang telah berlangsung selama kurang lebih satu tahun. Selama satu tahun ini, paket-paket kebijakan yang ditujukan untuk berbagai sektor industri ini disambut baik oleh para pelaku industri. Bahkan bukan itu saja, paket tersebut juga dianggap telah mampu memberikan jaminan kepastian bagi dunia industri. Komitmen Pemerintah terkait penanaman modal diwujudkan dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Ekonomi Jilid Dua yang terfokus pada mendorong pertumbuhan investasi di Indonesia. Strategi-strategi yang telah disiapkan antara lain:

1. Proses perizinan yang lebih sederhana
2. Pengesahan *tax allowance* dan *tax holiday* yang lebih cepat
3. Pembebasan PPN untuk impor alat angkut tertentu
4. Pajak bunga deposito yang lebih rendah bagi eksportir

Pemerintah memangkas waktu untuk mengurus izin investasi di kawasan industri, yakni hanya sekitar tiga jam saja. izin yang bisa selesai dalam tiga jam tersebut meliputi izin prinsip, akte perusahaan, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sebelumnya memakan waktu hingga berbulan-bulan. Sementara itu, pemerintah juga berusaha mengoptimalkan insentif *tax allowance* dan *tax holiday* yang sebelumnya telah disahkan masing-masing dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 dan Nomor 159 Tahun 2015. Proses pemberian persetujuan dapat berlangsung relatif cepat bagi wajib pajak yang mengajukan permohonan untuk memperoleh kedua insentif tersebut, untuk *tax allowance* paling lama 25 hari, sedangkan pengurusan *tax holiday* membutuhkan lebih panjang yaitu maksimal 45 hari.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2015, pemerintah membebaskan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor alat angkutan tertentu. Melalui kebijakan ini, biaya pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia diharapkan dapat ditekan. Infrastruktur transportasi yang belum memadai selama ini merupakan salah satu faktor mengapa rantai distribusi barang dan jasa di tanah air belum efisien. Hal ini menjadi disinsentif bagi para calon investor yang ingin menanamkan modalnya. Adapun terkait bunga deposito, pemerintah siap memberikan pajak bunga deposito yang lebih rendah bagi para eksportir Indonesia yang menyimpan dananya di bank-bank Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat menjadi insentif bagi mereka agar tidak menyimpan Devisa Hasil Eksport (DHE) di luar negeri. Jika dana tersebut dikonversi menjadi rupiah, potongan yang diberikan akan lebih rendah dengan perhitungan Satu bulan 7,5 persen, tiga bulan 5 persen, dan 6 bulan langsung nol persen.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP Provinsi Banten**

Dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini, maka DPMPTSP Provinsi Banten dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan pelaksanaan Misinya, untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Dalam Renstra DPMPTSP Provinsi Banten, tujuan tersebut adalah:

1. Mewujudkan kelembagaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel.
2. Meningkatkan daya tarik penanaman modal di Provinsi Banten.
3. Meningkatkan kepercayaan investor dalam menanamkan modalnya di Provinsi Banten.
4. Meningkatkan kepercayaan investor dalam menanamkan modalnya di Provinsi Banten.
5. Meningkatkan alternatif minat dan daya tarik penanaman modal bagi investor.

Selanjutnya, untuk mencapai hasil yang optimal yang ingin dicapai selama periode perencanaan, maka DPMPTSP Provinsi Banten merumuskan tujuan, sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Mewujudkan kelembagaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, yang dapat dicapai dengan sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)
2. Meningkatkan daya tarik penanaman modal di Provinsi Banten, yang dapat dicapai dengan sasaran:
  - a. Terbentuknya sistem promosi penanaman modal yang modern dan komprehensif.
  - b. Terbentuknya kerjasama (MoU) ideal antara investor dengan BUMD.
  - c. Tersusunnya strategi promosi penanaman modal.

3. Meningkatkan kepercayaan investor dalam menanamkan modalnya di Provinsi Banten yang dapat dicapai dengan sasaran:
  - a. Terimplementasikannya perizinan yang diperoleh oleh penanaman modal secara proporsional dan sesuai dengan peruntukannya.
  - b. Terjaminnya proses implementasi izin penanaman modal.
  - c. Tereliminasinya potensi permasalahan yang timbul dari kegiatan penanaman modal.
4. Meningkatkan kepercayaan investor dalam menanamkan modalnya di Provinsi Banten, yang dapat dicapai dengan sasaran:
  - a. Terjaminnya penerbitan perizinan tepat waktu.
  - b. Terjaminnya pelayanan non perizinan tepat waktu.
  - c. Terjaminnya penangangan pengaduan pelayanan perizinan diselesaikan tepat waktu.
5. Meningkatkan alternatif minat dan daya tarik penanaman modal bagi investor, yang dapat dicapai dengan sasaran:
  - a. Tersedianya data dan informasi potensi dan profil penanaman modal yang update.
  - b. Tersusunnya strategi pengembangan penanaman modal di provinsi banten.

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Selama kurun waktu 2017-2022, Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan Visi “*Banten yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah*”, Visi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam lima Misi yaitu:

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
2. Membangun dan Meningkatkan kualitas infrastruktur.
3. Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas.
4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas.
5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Guna mendukung target yang telah direncanakan, DPMPTSP Provinsi Banten akan melaksanakan dua Program dan 20 Kegiatan yang

dialokasikan kepada masing-masing bidang sesuai dengan tugas fungsinya.

1. Program Tata Kelola Pemerintahan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan kualitas perencanaan program, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada DPMPTSP Provinsi Banten yang baik sehingga pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang Penanaman modal dapat berjalan dengan optimal. Selain itu, dukungan sarana dan prasarana diberikan kepada aparatur pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai effektivitas dan effisiensi dan mewujudkan bantuan administrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran serta meningkatkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

- a. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset.
- b. Kegiatan Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
- c. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor.
- d. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor.
- e. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran.
- f. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur.
- g. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah.
- h. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan.
- i. Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

2. Program Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Program ini bertujuan untuk menyediakan data dan informasi penanaman modal, serta terpeliarhanya jaringan *hardware* dan *website*, terdatanya jumlah perusahaan PMDN dan PMA, optimalisasi regulasi, fasilitasi dan pelayanan perizinan dan non perizinan agar dapat memenuhi proses perizinan dengan cepat, transparan dan akuntabel, meningkatkan kualitas promosi investasi dan kerjasama investasi, baik PMA dan PMDN di Banten melalui koordinasi dan kerjasama investasi antar pemerintah dan dunia usaha serta terjalannya kerjasama pengusaha PMDN dan PMA, juga

terlaksananya promosi investasi dalam dan luar daerah dengan memperkenalkan produk unggulan daerah.

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal.
- b. Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Promosi.
- c. Kegiatan Pembinaan BUMD dan Kerjasama Penanaman Modal.
- d. Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Daerah.
- e. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah.
- f. Kegiatan Pengembangan Data Potensi Penanaman Modal Daerah.
- g. Kegiatan Pemantauan Realisasi Penanaman Modal.
- h. Kegiatan Pembinaan Penanaman Modal.
- i. Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal dan Perizinan.
- j. Kegiatan Pelayanan Perijinan.
- k. Kegiatan Pelayanan Non Perijinan.
- l. Kegiatan Pelaporan dan Pengaduan Pelayanan Perijinan.

Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DPMPTSP Provinsi Banten Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN BERIKUTNYA	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				17.064.800.000				21.784.483.700
1212	PENANAMAN MODAL				17.064.800.000				12.596.124.200
1212.01	PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN	Nilai IKM		2,8 (Skala1-4)	7.815.827.000			2,8 (Skala1-4)	12.596.124.200
1212.121201.01.001	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset				7.880.000				8.668.000
1	Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan	Dokumen Laporan Keuangan	Provinsi Banten	1 Dokumen	3.200.000	APBD		1 Dokumen	3.520.000
2	Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)	Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Provinsi Banten	2 Dokumen	2.200.000	APBD		2 Dokumen	2.420.000
3	Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	Dokumen Laporan Pajak	Provinsi Banten	1 Dokumen	2.480.000	APBD		1 Dokumen	2.728.000
1212.121201.01.002	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan				69.250.000				
1	Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan	Dokumen Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan	KP3B	3 Dokumen	3.100.000	APBD		3 Dokumen	
2	Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan	Dokumen Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan	Banten	9 Dokumen	64.270.000	APBD		9 Dokumen	
3	Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian	Dokumen Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian	Banten	5 Dokumen	920.000	APBD		5 Dokumen	
4	Monitoring dan Evaluasi	Dokumen Monitoring dan Evaluasi	Banten	4 Dokumen	960.000	APBD		4 Dokumen	
1212.121201.01.003	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor				1.292.212.000				2.851.310.000
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kantor	KP3B	10 Paket	1.292.212.000	APBD		10 Paket	2.851.310.000
1212.121201.01.004	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor				1.000.000.000				1.210.000.000
1	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara	KP3B	8 Paket	363.020.000	APBD		8 Paket	550.000.000
2	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	KP3B	26 Unit/Tahun	533.030.000	APBD		26 Unit/Tahun	550.000.000
3	Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK	Jumlah inventaris kantor yang terpelihara	KP3B	100 Unit/Tahun	103.950.000	APBD		100 Unit/Tahun	110.000.000

1212.121201.01.005	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran				2.350.959.600			2.634.298.700
1	Operasional kantor Tidak tetap	Operasional kantor tidak tetap yang terakomodir	KP3B	12 Bulan	133.480.000	APBD	12 Bulan	385.000.000
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)	Tersedianya Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)	KP3B	2 Paket/Tahun	203.840.000	APBD	2 Paket/Tahun	330.000.000
3	Penyediaan Barang Habis Pakai	Tersedianya Barang Habis Pakai	KP3B	12 Bulan	49.899.600	APBD	12 Bulan	110.000.000
4	Penyediaan Bahan Cetak	Tersedianya Bahan Cetak	KP3B	12 Jenis/Bulan	30.300.000	APBD	12 Jenis/Bulan	220.000.000
5	Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Tersedianya Makan dan Minum Kantor	KP3B	12 Bulan	450.000.000	APBD	12 Bulan	330.000.000
6	Penyediaan Promosi dan Publikasi	Jumlah promosi dan publikasi	KP3B	3 Media/Tahun	70.000.000	APBD	3 Media/Tahun	220.000.000
7	Penyediaan Operasional Jasa Kantor	Operasional jasa kantor yang tersedia	KP3B	12 Bulan	989.280.000	APBD	12 Bulan	330.000.000
8	Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo	Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo	Provinsi Banten	2 Kegiatan	138.560.000	APBD	2 Kegiatan	165.000.000
9	Penyediaan BBM	BBM yang tersedia	KP3B	12 Bulan	285.600.000	APBD	12 Bulan	544.298.700
1212.121201.01.006	Peningkatan Kapasitas Aparatur				298.078.400			1.100.000.000
1	Fasilitasi Administrasi Kepegawaian	Jumlah administrasi Pegawai yang terfasilitasi	KP3B	100 Orang	108.078.400	APBD	100 Orang	825.000.000
2	Peningkatan Kompetensi Aparatur	Jumlah pegawai yang berkompetensi	KP3B	100 Orang	190.000.000	APBD	100 Orang	275.000.000
1212.121201.01.007	Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah				2.741.147.000			4.600.117.500
1	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Koordinasi dan konslusasi ke luar daerah	Nasional dan Internasional	12 Bulan	1.796.542.000	APBD	12 Bulan	3.500.117.500
2	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Koordinasi dan konslusasi ke dalam daerah	Provinsi Banten	12 Bulan	944.605.000	APBD	12 Bulan	1.100.000.000
1212.121201.01.008	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan				50.000.000			165.000.000
1	Pengelolaan Perpustakaan Khusus SKPD	Tersedianya fasilitas perpustakaan perangkat daerah	KP3B	1 Paket	50.000.000	APBD	1 Paket	165.000.000
1212.121201.01.009	Penyediaan Data Pembangunan Sektoral				6.300.000			4.730.000
1	Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah	Dokumen profil kinerja DPMPTSP Provinsi Banten	Provinsi Banten	2 Dokumen	3.400.000	APBD	2 Dokumen	1.540.000

2	Pengelolaan PPID	Pengelolaan informasi publik	Provinsi Banten	4 Triwulan	2.900.000	APBD		4 Triwulan	3.190.000
1212.15	<b>PROGRAM PENINGKATAN IKLIM, PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI</b>	<b>Nilai Realisasi Investasi PMDN</b> <b>Nilai Realisasi Investasi PMA</b>		<b>Rp 13,4 Trilyun</b> <b>Rp 43 Trilyun</b>	<b>4.700.515.000</b>			<b>Rp 13,8 Trilyun</b> <b>Rp 47 Trilyun</b>	<b>1.770.516.000</b>
1212.121201.15.001	Penyelenggaraan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal				3.228.505.000				
1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal melalui Media Massa	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal melalui media massa	Lokal dan Nasional	10 Kegiatan/lokasi	1.744.660.000	APBD		10 Kegiatan/lokasi	
2	Partisipasi Bisnis Forum dan Pameran di Dalam Negeri	Jumlah keikutsertaan pada bisnis forum dan pameran penanaman modal di dalam negeri	Nasional	5 Kegiatan	974.925.000	APBD		5 Kegiatan	
3	Penguatan dan Fasilitasi Promosi Terpadu	Promosi Terpadu Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota (lokal, regional, nasional)	Nasional	1 Kegiatan	200.150.000	APBD		1 Kegiatan	
4	Banten Investment Gathering	Jumlah penyelenggaraan Banten Investment Gathering	Banten/Jakarta	1 Kegiatan	308.770.000	APBD		1 Kegiatan	
1212.121201.15.002	Pengembangan Sarana dan Prasarana Promosi				737.550.000				
1	Pengadaan Alat dan Bahan Promosi	Jumlah pengadaan alat dan bahan promosi	KP3B	3 Paket	437.550.000	APBD		3 Paket	
2	Penyusunan Branding Investasi	Jumlah branding investasi yang tersusun	Provinsi Banten	1 Dokumen	300.000.000	APBD		1 Dokumen	
1212.121201.15.003	Pembinaan BUMD dan Kerjasama Penanaman Modal				734.460.000				807.906.000
1	Fasilitasi Kerjasama BUMD Provinsi Banten	Jumlah fasilitasi kemitraan BUMD dengan pelaku usaha	Provinsi Banten	2 Kegiatan	229.490.000	APBD		2 Kegiatan	252.439.000
2	Forum Peningkatan Jaringan antar BUMD Provinsi	Jumlah ketersediaan dokumen masterplan BUMD	Provinsi Banten	1 Dokumen	246.750.000	APBD		1 Dokumen	271.425.000
3	Pengembangan BUMD Provinsi Banten	Jumlah ketersediaan dokumen penguatan kelembagaan BUMD	Provinsi Banten	1 Dokumen	258.220.000	APBD		1 Dokumen	284.042.000
1212.16	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Rasio Pemanfaatan Informasi Penanaman Modal</b>		<b>100%</b>	<b>1.656.780.000</b>			<b>100%</b>	<b>2.445.392.500</b>
1212.121201.16.001	Pengembangan Data Potensi Penanaman Modal Daerah				685.790.000				1.300.392.500
1	Pengelolaan Data Perkembangan Realisasi	Jumlah dan jenis data dan	Provinsi Banten	8 Dokumen	57.660.000	APBD		8 Dokumen	132.000.000

	Penanaman Modal	informasi							
2	Pemutakhiran Data Potensi dan Peluang Penanaman Modal dengan Kabupaten/Kota	Ketersediaan data realisasi PMA dan PMDN (nilai, negara, project, sektor, KLBI)	Provinsi Banten	4 Dokumen	395.925.000	APBD		4 Dokumen	598.213.000
3	Press Release Realisasi Penanaman Modal	Jumlah press release dan jumlah peserta yang hadir	Provinsi Banten	4 Kegiatan	232.205.000	APBD		4 Kegiatan	570.179.500
1212.121201.16.002	Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Daerah				320.990.000				495.000.000
1	Partisipasi Musyawarah Koordinasi Teknis (MUKORNIS)	Jumlah event kerjasama yang ada (skala lokal, regional, nasional)	Jakarta dan Nasional	1 Kegiatan	440.000	APBD		1 Kegiatan	165.000.000
2	Forum Perencanaan dan Pengembangan Investasi Daerah (Focus Group Discussion/FGD)	Jumlah perencanaan kebijakan pengembangan investasi	Provinsi Banten	4 Kegiatan	169.340.000	APBD		4 Kegiatan	165.000.000
3	Penyusunan Kebijakan Perencanaan dan Pengembangan Investasi	Jumlah profil dan peluang investasi (fokus dan lokus)	Provinsi Banten	3 Dokumen	151.210.000	APBD		3 Dokumen	165.000.000
1212.121201.16.003	Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah				650.000.000				650.000.000
1	Pengelolaan Website	Jumlah informasi penanaman modal yang terbaru	KP3B	4 Artikel	195.000.000	APBD		4 Artikel	195.000.000
2	Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik	Jumlah data statistik sektoral dan informasi geospasial yang tersedia	KP3B	1 Paket	404.575.000	APBD		1 Paket	403.275.000
3	Desain Pengembangan Sistem Informasi	Jumlah desain aplikasi sistem informasi penanaman modal yang terbaru	KP3B	1 Paket	50.425.000	APBD		1 Paket	51.725.000
1212.17	<b>PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN PENAMAN MODAL</b>	<b>Presentase Realisasi Perizinan sesuai Standar Pelayanan</b>		<b>100%</b>	<b>1.081.678.000</b>			<b>100%</b>	<b>1.452.451.000</b>
1212.121201.17.001	Pelayanan Perizinan				322.028.000				
1	Pelayanan Perizinan	Jumlah izin yang terlayani	KP3B	100 %	186.200.000	APBD		100 %	
2	Sosialisasi Pelayanan Perizinan	Jumlah regulasi perizinan yang tersosialisasikan	KP3B	4 Kegiatan	85.828.000	APBD		4 Kegiatan	
3	Penyusunan Kajian ISO 9001	Jumlah sertifikasi ISO 9001 yang telah teruji	KP3B	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	
1212.121201.17.002	Pelayanan Non Perizinan				487.500.000				536.250.000
1	Forum Sinergitas PTSP Provinsi Banten	Jumlah forum sinergitas PTSP yang terlaksana	Provinsi Banten	2 Kegiatan	71.746.000	APBD		2 Kegiatan	78.920.600

2	Rapat Koordinasi PTSP Provinsi Banten	Jumlah rapat koordinasi PTSP yang terlaksana	DPMPTSP Provinsi Banten	2 Kegiatan	81.746.000	APBD		2 Kegiatan	89.920.600
3	Penyusunan Profil PTSP	Jumlah dokumen profil PTSP	KP3B	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	55.000.000
4	Penyuluhan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah penyuluhan pelayanan perizinan dan non perizinan yang terlaksana	Provinsi Banten	1 Kegiatan	36.665.000	APBD		1 Kegiatan	40.331.500
5	Penyelenggaraan Bintek SDM PTSP Se-Provinsi Banten	Jumlah SDM PTSP yang menerima bimbingan teknis	Provinsi Banten	50 Orang	36.608.000	APBD		50 Orang	40.268.800
6	Fasilitasi Evaluasi Kemudahan Investasi Langsung Kontruksi ( KLIK )	Jumlah evaluasi KLIK yang terlaksana	Provinsi Banten	2 Kegiatan	210.735.000	APBD		2 Kegiatan	231.808.500
1212.121201.17.003	Pelaporan dan Pengaduan Pelayanan Perizinan				272.150.000				293.865.000
1	Fasilitasi Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan	Bahan Cetakan Penunjang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Informasi Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan	KP3B	1 Paket 1 Paket	104.000.000	APBD		1 Paket 1 Paket	108.900.000
2	Penyusunan Laporan Perizinan dan Non Perizinan	Penyusunan Dokumen Laporan Data Perizinan dan Non Perizinan	KP3B	120 Buku	15.200.000	APBD		120 Buku	16.720.000
3	Rapat Pengumpulan Data Pelaporan Realisasi Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten	Tersusunnya Laporan Kegiatan	Provinsi Banten	2 dokumen	62.950.000	APBD		2 dokumen	69.245.000
4	Penyusunan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tersusunnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	KP3B	2 Dokumen	60.000.000	APBD		2 Dokumen	66.000.000
5	Pembuatan Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	KP3B	1 Paket	30.000.000	APBD		1 Paket	33.000.000
<b>1212.18</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Cakupan Potensi Investasi yang Terealisasi</b>		<b>17,03%</b>	<b>1.810.000.000</b>			<b>17,09%</b>	<b>3.520.000.000</b>
1212.121201.18.001	Pemantauan Realisasi Penanaman Modal				725.000.000				1.595.000.000
1	Pemantauan dan Evaluasi Perkembangan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kawasan/zona/lokasi industri perusahaan PMA dan PMDN yang terpantau dan terevaluasi	Provinsi Banten	19 Kawasan	567.672.000	APBD		19 Kawasan	1.320.000.000
2	Rakor Percepatan Realisasi Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang difasilitasi percepatan realisasi penanaman modalnya	Provinsi Banten	100 Perusahaan	157.328.000	APBD		125 Perusahaan	275.000.000
1212.121201.18.002	Pembinaan Penanaman Modal				600.000.000				1.045.000.000

1	Penanganan Permasalahan Investasi	Jumlah permasalahan yang tertangani	Provinsi Banten	2 Kegiatan	27.800.000	APBD		2 Kegiatan	275.000.000
2	Pembinaan Dunia Usaha dan Non Dunia Usaha	Jumlah dunia usaha yang dibina Jumlah non dunia usaha yang dibina	Provinsi Banten	1 Kegiatan 3 Kawasan	339.200.000	APBD		1 Kegiatan 3 Kawasan	550.000.000
3	Pemberian penghargaan penanaman modal	Jumlah investor yang menerima penghargaan	Provinsi Banten	1 Kegiatan	233.000.000	APBD		1 Kegiatan	220.000.000
1212.121201.18.003	Pengawasan Penanaman Modal dan Perizinan				485.000.000				880.000.000
1	Pengawasan Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan	Jumlah perusahaan PMA dan PMDN berizin yang terawasi pelaksanaannya sesuai peruntukannya	Provinsi Banten	100 Perusahaan	147.900.000	APBD		125 Perusahaan	440.000.000
2	Pengawasan Perizinan	Jumlah pengawasan izin di tahun berjalan	Provinsi Banten	2 Kegiatan	337.100.000	APBD		2 Kegiatan	440.000.000
	<b>JUMLAH</b>				<b>17.064.800.000</b>				<b>21.784.483.700</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut, DPMPTSP Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp30.375.177.000,- yang bersumber dari Anggaran Pembangunan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018. Renja DPMPTSP Provinsi Banten selain menjadi kerangka pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2018 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja DPMPTSP Provinsi Banten.

Dokumen Renja ini juga diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf DPMPTSP Provinsi Banten sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Serang, 2017  
**Kepala DPMPTSP Provinsi Banten,**

**TTD**

**Drs. Wahyu Wardhana, MA.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19591001 198803 1 003